

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL: STUDI KASUS PADA SEBUAH PERGURUAN TINGGI NEGERI

Faiz Zamzami
Ihda Arifin Faiz

Universitas Gadjah Mada, Jl. Prof. Dr. Mr. Drs. Notonegoro Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Surel: faiz@ugm.ac.id

<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6003>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 6
Nomor 1
Halaman 1-174
Malang, April 2015
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
13 Oktober 2014
Tanggal Revisi:
10 Maret 2015
Tanggal Diterima:
16 April 2015

Abstrak: Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh PTN X sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Penelitian dilakukan dengan metode observasi arsip data, wawancara semi terstruktur, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan, secara umum sistem pengendalian internal PTN X telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan SPIP. Namun demikian, perlu pembenahan dalam aspek layanan pengadaan barang dan jasa, dokumentasi penilaian resiko, dan pengembangan aplikasi.

Abstract: An Evaluation of Internal Control System Implementation: a Case Study in a State University. This study aims to evaluate the implementation of the internal control system made by PTN X in accordance with the Internal Control System as provided in Regulation No. 60 of 2008. The study was conducted by the method of observation data archives, semi-structured interviews, and participation. The results showed, in general, the internal control system of PTN X has been executed properly and in accordance with SPIP. Nevertheless, it needs improvement in aspects of service provision, risk assessment documentation, and application development.

Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri

Sistem pengendalian internal berperan penting dalam menciptakan efisiensi dan produktivitas operasional, utamanya dalam mencapai tujuan institusi dan keberhasilan reformasi sektor publik (PP No.19 tahun 2005; Altamuro dan Beatty 2010). Hasil penelitian Altamuro dan Beatty (2010) menunjukkan perbaikan pengelolaan dan pelaporan pengendalian internal dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hanya saja sistem pengendalian internal yang dibentuk ternyata masih kurang berfungsi secara efektif di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dapat terlihat dari diterimanya pendapat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit laporan keuangan Kementerian Pendidikan yaitu wajar dengan pengecualian pada

tahun 2012 dan wajar tanpa pengecualian pada tahun 2013. Namun di periode yang sama (tahun 2012-2013) ditemukan indikasi tindakan kecurangan (*fraud*) di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dari hasil audit operasional yang dilakukan oleh BPK. Kondisi tersebut memberikan arah baru bagi tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) yang merupakan bagian dari *mainstream* global atas paradigma *Good Corporate Governance* (GCG).

Bongani (2013) menyatakan bahwa LSM di Zimbabwe menerapkan pengendalian internal dalam operasi yang dilakukan, meskipun variasi derajat dikaitkan dengan setiap aspek pengendalian internal yang didasarkan jenis, ukuran dan posisi yang ditempati oleh personel dalam organisasi. Hasil

penelitian lainnya, Musa (2010), menyoroiti ketidakcukupan pengendalian keamanan dalam implementasi Sistem Informasi Akuntansi yang terkomputerisasi, dan beberapa saran dan rekomendasi diperkenalkan untuk memperkuat titik lemah untuk menutup celah pengendalian keamanan Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi dalam organisasi di negara Saudi. Dari hasil beberapa penelitian tersebut peneliti ingin mendalami implementasi pengendalian internal di Perguruan Tinggi, apakah hasil penelitian akan sama dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai penerapan pengendalian internal terutama LSM di Zimbabwe. Penelitian ini belum banyak dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini di Universitas.

Merujuk hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal, PTN X telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun jika dibandingkan dengan hasil audit operasional yang dilakukan BPK, hasilnya secara operasional didapati temuan-temuan yang material terkait pengadaan barang dan jasa pada PTN X yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan internal PTN X. Adanya perbedaan hasil temuan dari dua institusi auditor eksternal tersebut dapat menjadi indikasi adanya potensi tata kelola dan pengendalian yang tidak sesuai. Pengendalian internal akan menjadi *early warning* yang efektif bagi institusi atas indikasi terjadinya *mismanagement* atau penyimpangan karena posisinya langsung bersinggungan dengan tubuh institusi keseluruhan. Dalam hal ini kami menjadikan PTN X sebagai subyek penelitian karena posisinya yang strategis. Selain itu, PTN X dapat menjadi *prototype* kompleksitas pengelolaan perguruan tinggi beserta evaluasi penerapan sistem pengendalian internal yang selama ini dijalankan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal unit kerja di PTN X dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Manfaat dari hasil penelitian ini bagi institusi nantinya dapat dijadikan sebagai pijakan untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal yang dijalankan sehingga dapat dipastikan sistem kerja dapat berjalan lebih dina-

mis dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang efektif bagi kemajuan institusi. Sebagai institusi publik yang tunduk di bawah hukum dan aturan yang berlaku, penilaian penerapan sistem pengendalian internal menjadi penting untuk memastikan institusi telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bingkai prosedur kerja yang telah ditetapkan. Berangkat dari hasil temuan penelitian ini, institusi dapat melakukan pembenahan atas penerapan sistem pengendalian internal atau dapat pula menjadi indikasi adanya kelemahan penyusunan sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran bagi institusi lain yang sejenis di bawah kementerian pendidikan dalam melakukan pengelolaan, penyusunan serta evaluasi sistem pengendalian internal. Dengan demikian, penyusunan sistem pengendalian internal dan penerapannya seharusnya dirancang untuk dapat mendukung operasional sistem kerja yang berjalan agar efektif dan efisien sesuai tuntutan SPIP. Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam persepektif peningkatan *good university governance* bagi Perguruan Tinggi Negeri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: partisipasi, observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, data yang didapatkan akan diolah dan dijelaskan mengacu pada studi pustaka yang telah dilakukan. Kemudian dengan menggunakan analisis deskriptif, peneliti menganalisis kesesuaian antara kriteria dan praktik implementasi sistem pengendalian internal di PTN X. Analisis ini berkenaan dengan pemenuhan butir-butir yang ditetapkan dalam unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Dalam studi kasus ini, analisis akan meliputi aspek-aspek berikut.

Pertama, analisis atas lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terha-

dap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan, dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Kedua, telah penilaian risiko. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Ketiga, analisis kegiatan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri dari, *Review* atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, *review* atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pemisahan tugas, kontinuitas pelayanan, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Keempat, penilaian informasi dan komunikasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Kelima, analisis atas pemantauan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak

lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya sebagaimana dimaksud harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: 1) Lingkungan Pengendalian, yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, 2) Penilaian Risiko, yaitu pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam, 3) Kegiatan Pengendalian, yaitu kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. 4) Informasi dan Komunikasi, yaitu informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.

Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya, 5) Pemantauan yaitu pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Konsepsi pengendalian internal di sektor publik bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (pasal 2 PP No 60 Tahun 2008). Keberadaan sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu institusi karena Pengendalian yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, bahkan kebangkrutan (*bankruptcy*) atau rusaknya reputasi. Jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya media pengendali risiko, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan institusi dalam mencapai tujuannya (Pickett 2003:86). Berdasarkan lima komponen pengendalian internal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP No. 60 tahun 2008), studi ini menemukan fakta tentang SPI di PTN X.

Evaluasi Lingkungan Pengendalian.

Peneliti memandang lingkungan pengendalian yang diterapkan di PTN X cukup baik dan mendukung penerapan sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang ada mencerminkan situasi yang dapat mendukung manajemen dalam menciptakan sistem pengendalian internal lembaga yang efektif yaitu a) Integritas dan Nilai Etika, yaitu Pimpinan Universitas telah menyusun kode etik bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bentuk pelanggaran terkait dengan kode etik diproses melalui proses Bina Aparatur Negara (BINAP) yang dikoordinasikan oleh Direktorat SDM, b) Komitmen kepada Kompetensi, yaitu Universitas memiliki komitmen dalam mendorong tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke bidang yang lebih tinggi dan mengambil sertifikasi keahlian. Kebijakan ini berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini tercermin kedalam Rencana Operasional (Renop) PTN X dan komitmen Direktorat SDM untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan beasiswa agar dapat melanjutkan

S1 dan S2 dan pelatihan yang berkelanjutan, c) Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi, yaitu Pimpinan Universitas mendukung dan mengembangkan Struktur pengelolaan keuangan yang baik (pencatatan hingga pelaporan baik secara manual maupun terkomputerisasi) sehingga tercipta pola keterbukaan, efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan lembaga tersebut, d) Struktur Organisasi yaitu struktur organisasi PTN X dirancang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan tugas pokok dan fungsi pimpinan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) terpusat di Kantor Pusat, sehingga pengadaan dilakukan terpusat melalui ULP dengan membentuk kelompok kerja, e) Penetapan dari Otoritas dan Pertanggung jawaban yaitu tanggung jawab dan pendelegasian otoritas pengelola Universitas telah ditetapkan secara jelas & tertulis pada masing-masing unit kerja. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Universitas. Pegawai yang diberi wewenang mampu memahami wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dengan baik.

Evaluasi Penilaian Risiko. Penilaian risiko baik identifikasi risiko dan analisis risiko lebih sering dilakukan oleh Satuan Audit Internal yaitu disusun dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara menyeluruh di PTN X yang digunakan untuk pemilihan unit yang akan diaudit dengan memperhatikan risiko yang paling besar akan menjadi prioritas dalam penugasan audit. Beberapa catatan dalam evaluasi penilaian risiko adalah belum ada dokumentasi pimpinan unit kerja di lingkungan PTN X dalam melakukan penilaian risiko yang berisi mengenai pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dihadapi.

Evaluasi Informasi dan Komunikasi. PTN X telah memiliki informasi dan komunikasi berupa sistem anggaran, penatausahaan keuangan, dan akuntansi yang digunakan untuk pemrosesan transaksi baik untuk penerimaan dan pengeluaran, pemrosesan sistem informasi dalam bentuk aplikasi anggaran yaitu Simabeka, aplikasi aplikasi sistem informasi keuangan untuk penatausahaan dalam pengajuan uang muka dan pembuatan pertanggung jawaban, aplikasi akuntansi yaitu untuk penyusunan laporan keuangan dan penyusunan kompilasi keuangan fakultas dan kantor

pusat PTN X, serta aplikasi asset yang digunakan untuk mencatat mutasi aset termasuk dalam penyusunan depresiasi aset. Catatan yang sebaiknya diperbaiki dalam proses pengembangan sistem terintegrasi adalah proses kompilasi Laporan Keuangan PTN X belum dilakukan secara otomatisasi melalui software akuntansi yang sudah ada, tetapi masih dilakukan secara manual dengan mempergunakan *spreadsheet (Microsoft Excel)*. Proses kompilasi tersebut sangat rawan terhadap salah saji dengan pertimbangan volume data yang harus dikompilasi cukup besar dan rawan terhadap kesalahan yang disebabkan oleh manusia.

Evaluasi Aktifitas Pengendalian.

Evaluasi terhadap aktivitas pengendalian internal pada pengelolaan keuangan meliputi: a) Reviu pencapaian atas kinerja pengelolaan PTN X (target penerimaan dan anggaran) oleh jajaran Pimpinan PTN X. PTN X melakukan review atas kinerja keuangan tiap semesteran yang bersamaan dengan proses penyusunan anggaran tahunan dan RKAT Perubahan dalam Rapat Kerja Universitas (RKU), selain itu proses reviu juga dilakukan oleh fungsi legislatif, b) Pembinaan SDM untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu target dan anggaran PTN X yang ditetapkan telah terdokumentasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disahkan pada tiap tahunnya dan menjadi komitmen bersama bagi Universitas dalam mencapai Visi dan Misi PTN X yang tersajikan dalam Rencana strategi dan Rencana operasional yang diturunkan ke visi, misi, dan Rencana operasional Fakultas, c) Pemrosesan Informasi, yaitu akses ke data/buku-buku/catatan/laporandi PTN X sudah dikendalikan oleh pihak-pihak sesuai dengan tugas kerjanya dan hanya staf yang ditunjuk mempunyai otoritas yang dapat mengaksesnya karena setiap pegawai sudah memiliki gambaran pekerjaan yang jelas. Untuk pencatatan transaksi penerimaan Universitas saat ini dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Direktorat Keuangan namun masih ada beberapa kerjasama belum disetorkan melalui rekening Rektor PTN X. d) Pengendalian Fisik Aset/Sarana, yaitu Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik aset di PTN X telah disusun, diterapkan, dan dikomunikasikan kepada pegawai, hal ini ditunjukkan dengan bahwa setiap unit kerja ada staf yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai pengelola barang dan bertanggung

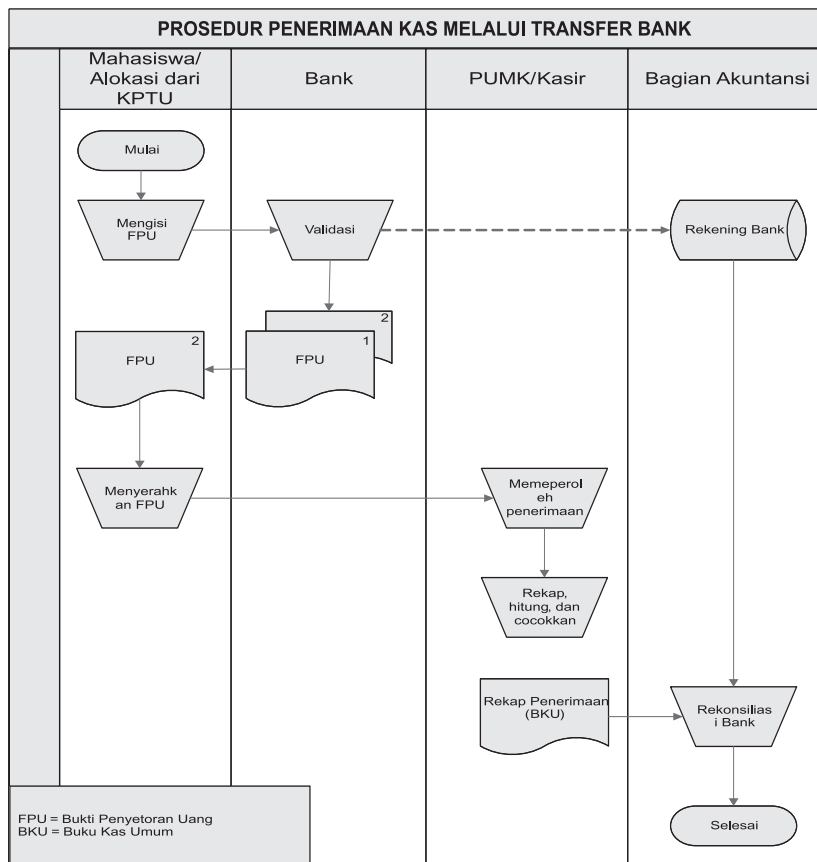
jawab kepada Direktorat Pengelola Aset, yang mengkoordinasikan untuk pengelolaan aset mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset di PTN X, e) Pemisahan tugas dan tanggung jawab sudah diterapkan yaitu adanya pemisahan antara bagian keuangan dengan bagian pengadaan, dan bagian akuntansi, hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan. f) Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penanganan suatu transaksi atau kejadian di PTN X sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada perangkapan tugas terutama dalam otorisasi, persetujuan, pemrosesan, dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan uang, reviu, dan pemeriksaan, misalnya dalam merealisasikan anggaran maka unit kerja harus mengajukan terlebih dahulu uang muka kerja dengan diotorisasi oleh atasan unit kerja yang mengajukan, kemudian Direktorat Keuangan melalui sistem keuangan melakukan verifikasi kesesuaian anggaran, setelah itu jika sudah sesuai maka Direktorat Keuangan akan menyetujui uang muka tersebut dan sebaliknya pada saat menyusun pertanggung jawaban juga akan diverifikasi oleh Direktorat Keuangan dan pada periode tertentu akan diperiksa oleh Satuan Audit Internal, g) Transaksi atau kejadian yang sah yang dikerjakan oleh staf yang ditunjuk dengan merujuk pada RKAT unit kerja, h) Pencatatan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dan dicatat secara tepat sesuai dengan Bagan Akun Standar dan jenis kegiatan yang dilakukan, misal kegiatan pendidikan, kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan peningkatan layanan dan kegiatan lainnya, secara umum pada aktivitas pengendalian sudah didokumentasikan dan diterapkan dengan jelas namun masih ditemukan transaksi penerimaan yang tidak disetor ke rekening Rektor misal kegiatan kerjasama. Namun penerimaan tersebut sudah tersajikan dalam laporan keuangan hanya saja prosedurnya yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang dibuat. Contoh *flowchart* penerimaan dan pengeluaran melalui bank dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Evaluasi Pemantauan. pemantauan yang telah dilakukan terdiri atas: a) Monitoring kegiatan yang sedang berjalan (*On-going Monitoring*) yaitu pengawasan secara langsung dan melekat dilakukan oleh atasan langsung yang ditunjukkan dengan adanya otorisasi untuk setiap transaksi mulai dari

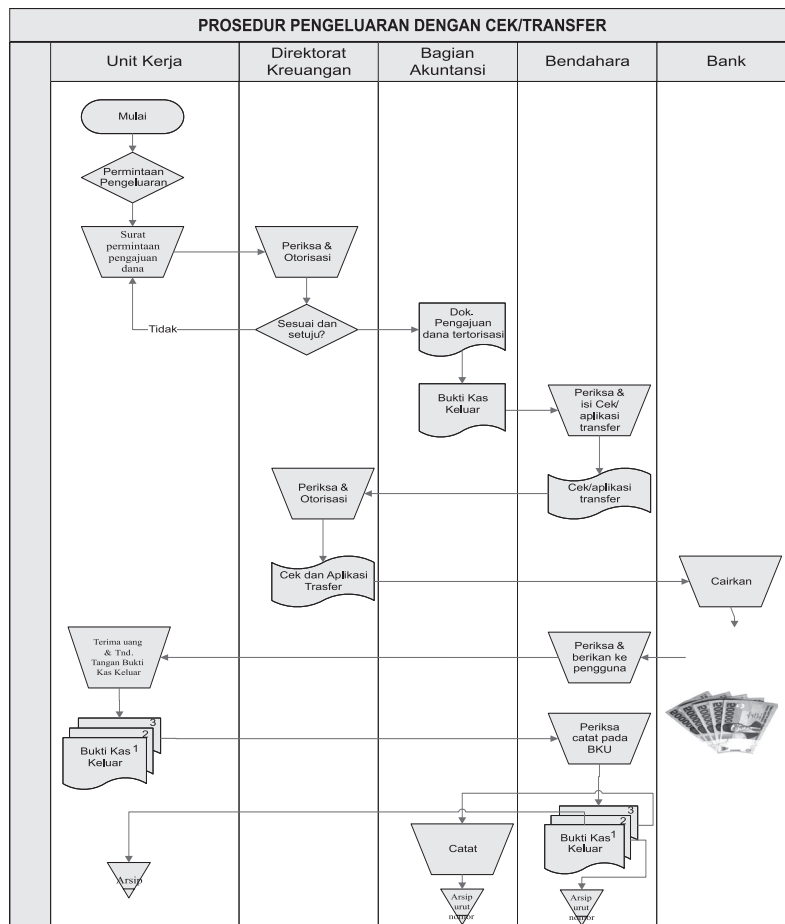
pengajuan dana sampai dengan pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. PTN X memiliki unit kerja yaitu Satuan Audit Internal yang secara rutin melakukan penugasan audit dan konsultasi pada unit kerja dilingkungan PTN X dan Dewan Audit yang secara periodik melakukan review atas hasil audit KAI dan Kantor Akuntan Publik, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). b) Tindak lanjut atas temuan audit yaitu PTN X memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan review lainnya. Dari hasil audit Kantor Akuntan Publik, BPK dan Inspektorat yang disampaikan hasilnya kepada pimpinan Universitas, temuan-temuan tersebut pimpinan Universitas melalui Kantor Audit Internal melakukan monitoring tindak lanjut.

Dari hasil penelitian di atas berdasarkan lima komponen pengendalian internal sesuai SPIP (PP No. 60 tahun 2008) dapat dipastikan bahwa PTN X tidak termasuk perguruan tinggi negeri yang melakukan ke-

curangan dari hasil audit operasional oleh BPK tahun 2012-2013. Apabila PTN telah memenuhi komponen pengendalian internal sesuai SPIP maka dapat dijadikan indikasi pelaporan keuangan disajikan dengan baik dan terbebas dari kecurangan sebagaimana temuan Altamuro dan Beatty (2010). Untuk dapat mengetahui secara pasti perguruan tinggi negeri mana yang terindikasi melakukan kecurangan maka BPK dapat melakukan investigasi lebih mendalam. Temuan ini mendukung Bongani (2013) yang menunjukkan tidak adanya variasi yang signifikan pada penerapan sistem pengendalian internal apabila suatu institusi telah memenuhi kriteria pengendalian internal yang ditentukan. Variasi penerapan sistem pengendalian internal lebih disebabkan faktor sumber daya manusia (SDM) dan pemakaian akuntansi sebagaimana temuan Bongani (2013) dan Bowrin (2004) sehingga perlu upaya perbaikan terstruktur dan sistematis atas peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan sistem, utamanya sistem akuntansi.



Gambar 1.
Flowchart Penerimaan Kas melalui Bank



Gambar 2
Flowchart Pengeluaran melalui Bank

SIMPULAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa elemen-elemen sistem pengendalian internal yang diaplikasikan oleh PTN X cukup efektif dan mendukung praktik manajerial yang baik. Akan tetapi pada beberapa aspek juga masih mengandung beberapa kelemahan untuk diperbaiki yaitu, meningkatkan kepatuhan terhadap standar prosedur yang telah disusun. Pertama, setiap penerimaan harus disetor ke rekening Universitas dengan atas nama Rektor terutama untuk pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga. Kedua, dokumentasi penilaian risiko oleh pimpinan Universitas dan unit kerja di lingkungan PTN X harus dilakukan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Ketiga, perlu dikembangkan sistem informasi akuntansi untuk dapat menyajikan informasi saldo secara tepat waktu dan terintegrasi dengan aplikasi lain, misal sistem informasi anggaran, sistem informasi, sumberdaya manusia, dan sistem

informasi aset. Keempat, proses kompilasi Laporan Keuangan perlu dilakukan secara otomatis.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan *good university governance* sehingga visi, misi dan tujuan Universitas dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Persiapan secara serius atas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan sistem perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem akuntansi.

DAFTAR RUJUKAN

Musa A.A. 2010. "Investigating Adequacy of Security Controls in Saudi Banking Sector an Empirical Study". *Journal of Accounting – Business & Management*, Vol. 17, No. 1, hlm 1-41.

Altamuro, J., dan A. Beatty. 2010. "How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting?". *Journal of Accounting and Economics* 49, hlm 58-74.

Bongani, N. 2013. "Application of Internal Controls in NGOs: Evidence from Zim-

- babwe". *American Journal of Finance and Accounting*, Vol. 1, No. 2, hlm 39-47.
- Bowrin, A. 2004. "Internal control in Trinidad and Tobago religious organizations". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 17, No. 1, hlm 121-152.
- Cooper, D. R., dan P. S. Schindler. 2008. *Business Research Method*. McGraw Hill. . New York.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE-Yogyakarta
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pickett, K.H.S. 2003. *The Essential Handbook of Internal Auditing*, 2nd Edition. John Wiley and Sons, Inc. West Sussex.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.